

TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang harus ikut mendukung dan berkontribusi nyata dalam mewujudkan visi Kabupaten Purbalingga yaitu **“Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia”**.

Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang sangat erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 pada misi ke 5 yaitu *Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitaraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan lapangan kerja*. Salah satu tujuan dari misi ke 5 yang erat kaitannya dengan penanaman modal adalah *Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat*, dengan sasaran Meningkatkan investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.

A. Tujuan Pembangunan Penanaman Modal

Pada RPJMD (2016-2021), disebutkan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. Penanaman Modal termasuk dalam Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar bersama dengan Urusan Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Peternakan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Koperasi UKM.

Peran penanaman modal dalam pertumbuhan ekonomi tergambarkan dalam persentase andil terhadap PDRB, dari Sektor Industri Pengolahan, serta Perdagangan dan Jasa, yang secara bertahap menggeser porsi bidang pertanian, disamping itu peran penanaman modal juga penghasil devisa negara dari ekspor produk perusahaan dan penyerap tenaga kerja.

Pembangunan urusan penanaman modal merupakan bagian dari Misi ke 5 yaitu Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong

simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja. Tujuan pembangunan urusan penanaman modal adalah Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Seiring dengan tujuan pembangunan urusan penanaman modal, maka *tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah **Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.***

B. Sasaran Jangka Menengah Pembangunan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah :

1. Meningkatnya realisasi investasi baru;
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan;

Target Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Sasaran Pada tahun 2021
1.	Meningkatnya realisasi investasi baru	Realisasi nilai investasi	Tumbuh 770.000.000.000,- pada tahun ke 5
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan	Menjadi 82,25 pada tahun ke 5

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun (Rp. Juta)					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat	Meningkatnya realisasi investasi baru;	Realisasi nilai investasi	270.000	320.000	470.000	570.000	670.000	770.000
		Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan	81,35	81,50	81,70	81,90	82,00	82,25

C. Strategi dan Kebijakan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

Tantangan pembangunan penanaman modal / investasi yang nyata dihadapi pada masa yang akan datang adalah tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat yang dihasilkan dari kegiatan sector ekonomi atau investasi yang harus diikuti dengan pelayanan yang semakin baik. Sementara ketersediaan lahan peruntukan investasi sector riil terutama perdagangan dan jasa, industri dan perumahan / property akan yang semakin terbatas, bersaing dengan upaya mempertahankan kemampuan kecukupan dan ketahanan pangan yang juga membutuhkan lahan yang cukup.

Sedangkan tantangan pelayanan terpadu yang nyata adalah semakin meningkatnya keinginan dunia usaha atas pelayanan yang semakin cepat, mudah, murah, praktis, pasti dan transparan sedangkan regulasi dan kemampuan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta system pelayanan yang masih sangat terbatas.

Tantangan tersebut tentu tidak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi dan peradaban yang semakin maju, yang saat ini dikuasai oleh teknologi informasi yang serba digital. Hal-hal tersebut diatas berimplikasi terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk memecahkan permasalahan-permasalahan pembangunan penanaman modal / investasi dan pelayanan terpadu satu pintu 5 (lima) tahun ke depan. Salah satu analisis yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan pembangunan penanaman modal / investasi dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Purbalingga, sekaligus mengatasi permasalahan yang ada adalah melalui analisis SWOT. Analisis SWOT ini meliputi kondisi lingkungan internal yaitu *strength* (kekuatan) dan *weakness* (kelemahan)

yang dimiliki, dan kondisi lingkungan eksternal yaitu *opportunitiy* (peluang) dan *threats* (ancaman). Kondisi internal dan eksternal tersebut antara lain adalah :

1. *Strength* (Kekuatan)

- a. Adanya Perda tentang pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga kelembagaannya lebih kuat;
- b. Adanya sumber daya manusia dari berbagai disiplin ilmu;
- c. Besarnya perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan penanaman modal / investasi dan pelayanan terpadu;
- d. Tersedianya peraturan perundang-undangan / regulasi lingkup penanaman modal dan pelayanan publik;
- e. Masih tersedianya lahan peruntukan investasi;
- f. Infrastruktur yang memadai dan sedang terus dikembangkan;
- g. Adanya ketersediaan tenaga kerja produktif dalam jumlah yang cukup.

2. *Weakness* (Kelemahan)

- a. Sinergitas aturan penanaman modal dan perizinan antar kelembagaan yang masih rendah;
- b. Pelayanan masih belum berbasis teknologi informasi sepenuhnya;
- c. Belum tersedianya bahan promosi investasi yang memadai (dalam bentuk kajian *feasibility study*) dari masing-masing bidang;
- d. Kinerja pelayanan belum optimal;
- e. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan instansi terkait tentang pelayanan perizinan.

3. *Opportunity* (Peluang)

- a. Iklim usaha yang kondusif;
- b. Kebijakan pemerintah pusat yang terus berupaya mempermudah ketentuan pelayanan perizinan dan investasi;
- c. Potensi investasi di Kabupaten Purbalingga yang masih besar, terutama bidang pertanian;
- d. Pengembangan Bandara Panglima Besar Jendral Soedirman menjadi bandara komersial;

- e. Rencana pembangunan Jalan Tol Brebes – Semarang dengan *exit tol* di Pemalang akan memperlancar aksesibilitas Purbalingga ke kota-kota besar.

4. *Threats* (Ancaman)

- a. Semakin terbatasnya ketersediaan lahan peruntukan investasi;
- b. Menurunnya kualitas dan daya tampung lingkungan akibat kegiatan investasi;
- c. Persaingan investasi akibat pemberlakuan perdagangan global;
- d. Rendahnya minat investasi bidang pertanian;

Strategi dan Kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah :

A. Strategi

- (1) Meningkatkan kecukupan kebutuhan dan kelancaran operasional dan pelayanan OPD
- (2) Menciptakan iklim investasi yang kondusif
- (3) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan

B. Kebijakan

- 1. Menyediakan kebutuhan operasional dan pelayanan OPD
- 2. Menyusun bahan promosi dan pemasaran investasi;
- 3. Melaksanakan dan mengikuti pameran promosi investasi
- 4. Mendorong terjalinnya kemitraan investasi
- 5. Mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang pro investasi
- 6. Meningkatkan pengawasan dan pendampingan serta bimbingan pelaporan investasi investasi
- 7. Meningkatkan kapasitas SDM pelayanan
- 8. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan
- 9. Melaksanakan sosialisasi perizinan
- 10. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan yang jelas dan mudah

11. Melaksanakan terobosan pelayanan cepat (jemput bola, sehari langsung jadi, izin antar alamat)
12. Penyediaan fasilitas layanan mandiri dan system layanan on line
13. Melaksanakan penambahan pelimpahan kewenangan perizinan kepada PTSP
14. Menyediakan layanan pengaduan yang memadai

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat	Meningkatnya realisasi investasi baru	Menciptakan iklim investasi yang kondusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun bahan promosi dan pemasaran investasi; 2. Melaksanakan dan mengikuti pameran promosi investasi 3. Mendorong terjalannya kemitraan investasi 4. Mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang pro investasi 5. Meningkatkan pengawasan dan pendampingan serta bimbingan pelaporan investasi
	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan;	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas SDM pelayanan 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan 3. Melaksanakan sosialisasi perizinan 4. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan yang jelas dan mudah 5. Melaksanakan terobosan pelayanan cepat (jemput bola, sehari langsung jadi, izin antar alamat) 6. Penyediaan fasilitas layanan mandiri dan system layanan on line 7. Melaksanakan penambahan pelimpahan kewenangan perizinan kepada PTSP 8. Menyediakan layanan pengaduan yang memadai

Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program serta indikator kinerja Urusan Penanaman Modal dalam RPJMD digambarkan sebagai berikut :

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
1	Meningkatnya Investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat	Realisasi nilai investasi	Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif	Peningkatan Promosi Investasi	Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitas Investasi
			Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	Peningkatan kepastian serta kemudahan Perijinan	Program Pelayanan Perijinan Satu Pintu